

## ANALISIS REVIEW PENDETEKSIAN KECURANGAN (FRAUD)

Duma Megaria Elisabeth, Wesly Simanjuntak

Universitas Methodist Indonesia  
[duma0803@yahoo.com](mailto:duma0803@yahoo.com)

### ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk membahas berbagai macam metode pendeteksian kecurangan yang dilakukan oleh para peneliti di Indonesia, baik di perusahaan ataupun pada entitas sektor publik. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan studi literatur dari berbagai penelitian tentang kecurangan yang ada di Indonesia. Model penelitian ini adalah dengan menggunakan model penelitian review literatur dengan menggunakan metode Systematic mapping study. Systematic mapping study adalah metode literature review yang sistematis dengan menggunakan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan tambahan wawasan kepada seluruh pihak termasuk manajemen perusahaan, auditor, dan pengguna laporan keuangan tentang berbagai macam metode yang dapat digunakan untuk mendeteksi kecurangan.*

**Kata Kunci: Kecurangan Laporan Keuangan, Kecurangan, Pendeteksian Kecurangan**

### PENDAHULUAN

Kecurangan merupakan tindakan yang sangat merugikan perusahaan maupun organisasi baik swasta maupun organisasi publik Kusuma & Sukirman (2017), Lokanan (2019) dan Ataman & Aydin (2017). Oleh karena itu tindakan kecurangan akan selalu di perangi oleh organisasi swasta sampai dengan organisasi publik. Begitu juga di Indonesia, banyak kasus-kasus kecurangan yang terjadi di organisasi publik yaitu organisasi pemerintah (Kiswanto & Maulana, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa kecurangan harus segera ditangani (Hardinto, 2018), oleh karena itu setiap perusahaan ataupun instansi pemerintah

memerlukan auditor untuk memeriksa laporan keuangan. Kecurangan pada instansi pemerintah tidak hanya melibatkan orang-orang yang mempunyai jabatan tinggi tetapi juga orang-orang yang berada dibawahnya, serta tidak hanya terjadi di lingkungan pemerintah pusat (Malau, Ohalehi, Badr, Yejini, 2018) melainkan juga dapat terjadi dalam lingkungan pemerintah daerah (Evenri, 2019). Agar kecurangan dapat diminimalisir pemerintah tentu saja perlu mengambil tindakan untuk meningkatkan pengendalian internalnya. Sikap-sikap ini termuat dalam standar umum auditing yang terdapat pada SPKN (Standar Pemeriksaan

Keuangan Negara). Di dalam SPKN dinyatakan bahwa sikap umum seorang auditor yang berhubungan dengan pribadinya adalah kompetensi (keahlian dan pelatihan teknis), independensi, dan profesionalisme (penggunaan kemahiran profesional auditor dengan cermat dan

Selama periode 2002 – 2018 Auditor pada BPK Provinsi Sumatera Utara menemukan sekitar 5.330 kasus dengan kerugian uang negara sekitar Rp 1 triliun (Librayanti, 2018). Kasus kecurangan dalam pengelolaan keuangan negara identik dengan fenomena gunung es, yaitu jumlah kecurangan yang menurut auditor lebih kecil daripada kondisi aktual. Pengendalian terhadap kecurangan pelaporan keuangan telah menarik perhatian dan respon yang terkait dalam beberapa tahun terakhir karena kerugian yang tak terhitung mungkin terjadi pada jangka panjang perusahaan atau sebuah entitas. Pengendalian terhadap kecurangan harus dilakukan di masing-masing entitas. Seperti yang diungkapkan oleh (Muna&Harris, 2018) yang mengungkapkan tentang pengaruh pengendalian internal

seksama). Oleh karena itu, auditor harus mempunyai dan mempertahankan ketiga sikap ini karena sikap-sikap ini sangat diperlukan auditor agar ia tidak gagal dalam mendeteksi kecurangan dan setelah kecurangan tersebut terdeteksi, auditor tidak ikut menyembunyikan kecurangan tersebut.

berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. *Fraud* bukanlah hal yang baru bagi kehidupan manusia, bahkan *fraud* sudah menjadi mata pencaharian bagi kehidupan sebagian manusia sehari-hari. Berbicara mengenai *fraud* seolah tidak ada habisnya di dunia ini. *Fraud* menjadi akar masalah moral, etika, mental, tata nilai dan cara berpikir yang melandasi tindak kejahatan manusia. *Fraud* merupakan hal yang menyimpang atau dapat dikatakan sebagai perbuatan illegal. *Fraud* dapat diartikan sebagai perbuatan yang menyimpang dan merugikan orang lain yang dilakukan oleh seseorang maupun sekelompok orang untuk memperkaya diri dan merugikan pihak-pihak lain. Seringnya terjadi kecurangan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam

sebuah organisasi, perusahaan, dan juga di sektor publik (pemerintahan).

Pemerintah daerah adalah entitas yang menggunakan dana rakyat untuk menggerakkan kegiatan operasionalnya yaitu dengan menggunakan hasil pajak. Oleh karena itu seharusnya tingkat kepatuhan terhadap standar dan juga akuntabilitas publik juga harus dapat dipertanggungjawabkan. Meskipun saat ini kecurangan pelaporan keuangan banyak dibahas pada akuntansi sektor privat, peneliti tertarik untuk mengambil contoh kasus pada entitas sektor publik. Kecurangan akuntansi dan pelaporan keuangan meliputi (1) tindak pidana penyembunyian pelaporan pelanggaran keuangan pemerintah daerah atau (2) pelanggaran APBD yang disembunyikan pada LK dengan segala akal dan cara (Dr. Jan Hoesada, 2014).

Beberapa peristiwa yang melandasi pentingnya penelitian ini adalah adanya temuan oleh BPK yaitu kecurangan yang dilakukan oleh Pemda (Maharani, 2016). Kecurangan tersebut menurut Ketua BPK RI

Harry Aziz pada *Republika Online* diantaranya adalah masalah aset, soal bantuan dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD). Kecurangan tersebut berdampak pada kerugian negara secara langsung. Selain itu menurut BPK dalam *Republika.co.id* menyatakan bahwa hasil audit laporan keuangan Pemda terdapat kerugian sebesar Rp1,13 triliun (Saubani, 2017). Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara saat penyerahan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2017 kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menyampaikan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) menemukan 2.525 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian senilai Rp1,13 triliun dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Demikian pula pada harian *Medan Daily* (Pekuwali, 2018) diungkap beberapa permasalahan pada laporan keuangan pemda. Adapun masalah - masalah yang kerap ditemukan, antara lain terdapat

kekurangan kas pada bendahara pengeluaran, aset tetap tidak diyakini kebenarannya karena terdapat perbedaan nilai di neraca dengan nilai pendukung; aset disajikan dengan nilai Rp0,00; aset tidak didukung rincian yang memadai, tanah di bawah ruas jalan dan daerah irigasi belum disajikan dalam neraca serta nilai rehabilitasi aset tetap tidak diatribusikan ke aset tetap perolehan awal. Menjadi permasalahan yang menimbulkan pertanyaan di sini: Mengapa auditor eksternal gagal dalam mendeteksi kecurangan dalam laporan keuangan seperti yang dicontohkan di atas? Mestinya bila auditor eksternal yang bertugas pada audit atas perusahaan-perusahaan ini menjalankan audit secara tepat termasuk dalam hal pendeteksian kecurangan maka tidak akan terjadi kasus-kasus yang merugikan ini. Faktor apa saja yang menghalangi auditor eksternal dapat menjalankan tugasnya sehingga kecurangan dapat terdeteksi? Serta bagaimana upaya perbaikan sehingga auditor eksternal mampu memenuhi harapan pengguna laporan keuangan? Dari

keseluruhan penelitian tersebut adalah pendeteksian kecurangan dari dalam dan luar negeri, yang selama ini belum ada identifikasi tentang metode pendeteksian yang paling banyak digunakan oleh para peneliti di Indonesia sebagai alat yang digunakan untuk mendeteksi kecurangan di sektor publik ataupun privat. Oleh karena itu penelitian ini mengambil judul “Metode pendeteksian fraud yang ada di Indonesia: sebuah analisis review”.

## LITERATURE REVIEW

Menurut Kurrohman, dkk (2017) *fraud* merupakan sebuah tindakan yang menyebabkan kesalahan pelaporan dalam laporan keuangan, atau suatu tindak kesengajaan untuk menggunakan sumber daya perusahaan secara tidak wajar dan salah menyajikan fakta untuk memperoleh keuntungan pribadi. *Fraud* dapat diartikan sebagai tindakan melawan hukum (*illegal acts*). Oleh sebab itu, diperlukan penanganan untuk dapat mendeteksi dan juga dilakukan pencegahan oleh auditor.

Penelitian tentang pendeteksian kecurangan telah banyak dilakukan oleh peneliti di seluruh dunia. Diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh (Alamsyah & Rahardjo, 2013) yang melakukan deteksi kecurangan dengan menggunakan *social network analysis*. Demikian pula penelitian yang dilakukan oleh (Perols, 2011) yang melakukan penelitian tentang deteksi kecurangan laporan keuangan dengan menggunakan alat statistik dan mesin algoritma. Tujuan dilakukannya deteksi *fraud* adalah untuk menemukan dan membuktikan tindakan-tindakan ilegal yang dilakukan secara sengaja dan merugikan pihak-pihak lain. Dengan dilakukannya pendeteksian *fraud*, diharapkan akan meminimalisir adanya tindakan *fraud* tersebut, serta dapat mencegah tindakan tersebut dan mencapai *good goverments* yang baik. Jika dilakukan oleh auditor yang berpengalaman, maka akan membantu auditor dalam mendeteksi *fraud*. Penelitian terdahulu yang mendukung bahwa pengalaman berpengaruh signifikan terhadap pendeteksian *fraud* adalah Pramana, dkk

(2016), Usman dan Rahmawati (2014), Rafael (2013) dan Anggriawan (2014). Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Faradina (2016) menyatakan pengalaman memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap kemampuan mendeteksi kecurangan. Sedangkan penelitian terdahulu yang tidak mendukung bahwa pengalaman tidak berpengaruh signifikan terhadap pendeteksian *fraud* adalah Pramitasari, dkk (2017) dan Novita (2015). Pendeteksian kecurangan pelaporan keuangan telah diteliti oleh beberapa peneliti dari berbagai belahan dunia. Beberapa penelitian yang telah mengkaji tentang kecurangan pelaporan keuangan saat ini lebih dominan pada perusahaan privat sebagai obyek penelitian. (Albrecht, 2012) menulis tentang penggunaan *red flags* untuk menilai risiko kecurangan pada sebuah entitas.. Sedangkan pendeteksian kecurangan pelaporan keuangan dengan menggunakan rasio keuangan banyak diteliti oleh (Beneish, 2015) dan (Persons, 2011). Penelitian tersebut membahas tentang pendeteksian kecurangan dengan 8 sampai dari 10 rasio

keuangan. Sedangkan (Kaminski, Sterling Wetzel, & Guan, 2004) meneliti pendeteksian kecurangan pelaporan keuangan pada sektor privat dengan menggunakan lebih dari 20 rasio keuangan. Rasio *trends* juga telah dilakukan oleh (Cecchini M, Pathak, Koehler, 2010) dalam penelitian ini rasio *trend* (perubahan dari tahun ke tahun) menjadi sentral penelitian.

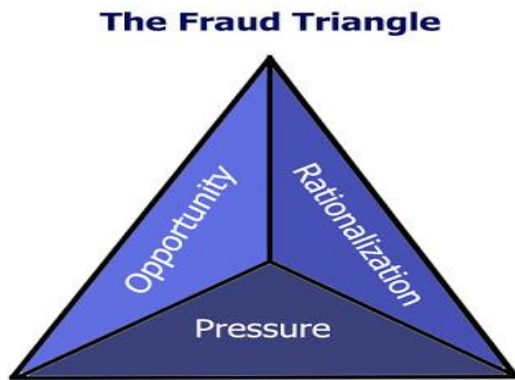
Penelitian tentang kecurangan pelaporan keuangan banyak dilakukan terutama untuk perusahaan privat. Sedangkan penelitian tentang kecurangan pelaporan keuangan di sektor publik masih sedikit dilakukan. (Puspitaningrum, 2014) meneliti tentang pendeteksian laporan keuangan dengan menyebarkan kuesioner kepada perangkat Pemda dan Satuan Pengendali Internal Pemerintah (SPIP). Dengan hasil penelitian bahwa integritas, nilai etis, dan komitmen atas kompetensi tidak berdampak pada munculnya kecurangan pelaporan keuangan. Sedangkan filosofi manajemen dan cara kerja dapat mempengaruhi munculnya kecurangan pelaporan keuangan. (Purnamasari &

Amaliah, 2015) meneliti tentang *Fraud prevention: relevance to religiosity and spirituality in the workplace*. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa ada hasil yang positif dan signifikan antara religiusitas dan spiritualitas terhadap pencegahan kecurangan. Penelitian ini dilakukan terhadap 30 responden sekaligus auditor BPKP di provinsi Jawa Barat.

## **Jenis – Jenis Fraud**

### **1. Teori *Fraud Triangle***

Dikemukakan oleh Cressey (1953) yang diteliti kembali oleh Abdullahi & Mansor (2015). Cressey mengemukakan hipotesis mengenai fraud triangle untuk menjelaskan alasan mengapa orang melakukan fraud. Cressey mengungkapkan bahwa ada 3 faktor yang mendukung seseorang melakukan fraud, yaitu yaitu *pressure* (dorongan), *opportunity* (peluang), dan *rationalization* (rasionalisasi).



Gambar 3a The Fraud Triangle

## 2. Teori *Fraud Scale*

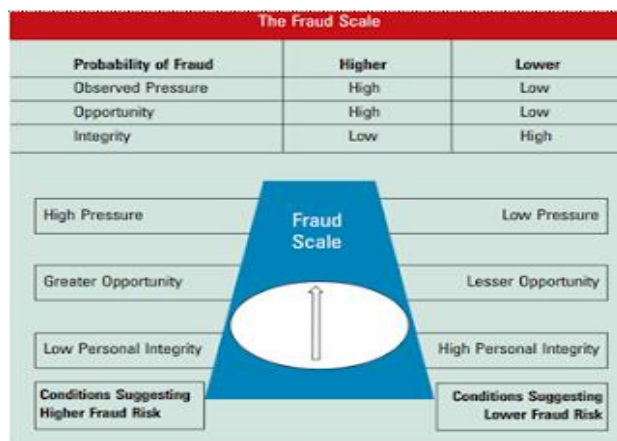
Penyebab terjadinya *fraud* sama dengan teori *fraud triangle*. Dan teori *scale* ini merupakan teori lanjutan dari teori *Fraud Triangle* yang merupakan pengukuran dari teori tersebut. Teori *fraud scale* merupakan perkembangan teori dari teori sebelumnya yaitu teori *fraud triangle*. Teori ini diperkenalkan oleh Albrecht, Keith Howe, dan Marshall Romney dalam *Detering Fraud: Internal Perspektif Auditor (Lembaga Internal Yayasan Penelitian Auditor, 1984)*. Dalam teori ini dapat menjelaskan kemungkinan terjadinya tindakan *fraud* atau kecurangan dengan cara mengamati tekanan, kesempatan dan integritas pelaku yang akan melakukan *fraud*. *Fraud Scale* mempunyai

tujuan untuk mengukur terjadinya pelanggaran etika, kepercayaan dan tanggung jawab. Kecurangan atau *fraud* ini biasanya mengarah pada penipuan laporan keuangan. Dalam *scale* dijelaskan bahwa kemungkinan tindakan penipuan dapat dinilai dengan mengevaluasi kekuatan tekanan, kesempatan dan integritas pribadi. Sebaliknya tekanan yang rendah, kesempatan kecil, dan integritas pribadi tinggi menyebabkan risiko terjadinya *fraud* rendah. Tujuan teori ini adalah untuk mengukur kemungkinan pelanggaran etika, kepercayaan dan tanggung jawab. Teori ini berlaku untuk beberapa pelanggaran salah satunya pelanggaran yang mengarah ke penipuan laporan keuangan. Sumber Tekanan menurut teori ini adalah perkiraan penjualan, laba manajemen. Karakteristik khusus menurut teori *fraud scale* adalah:

- a. Hidup di luar kemampuan mereka
- b. Keinginan yang besar untuk keuntungan
- c. Hutang pribadi yang tinggi

Sedangkan faktor risiko terjadinya *fraud* menurut teori ini adalah dikarenakan terlalu besar dalam menaruh kepercayaan

kepada karyawan serta lemahnya pengendalian dari atasan. Kecurangan paling sering terjadi ketika (i) tekanan pada situasi sangat tinggi, (ii) Integritas pribadi yang rendah, serta (iii) adanya kesempatan atau peluang yang tinggi untuk melakukan fraud.



Gambar 3b. *Fraud Scale*

### 3. Teori GONE



Gambar 3c : Teori Gone

Teori Gone merupakan teori yang dikemukakan oleh Bologna pada tahun 1999. Dalam teori ini

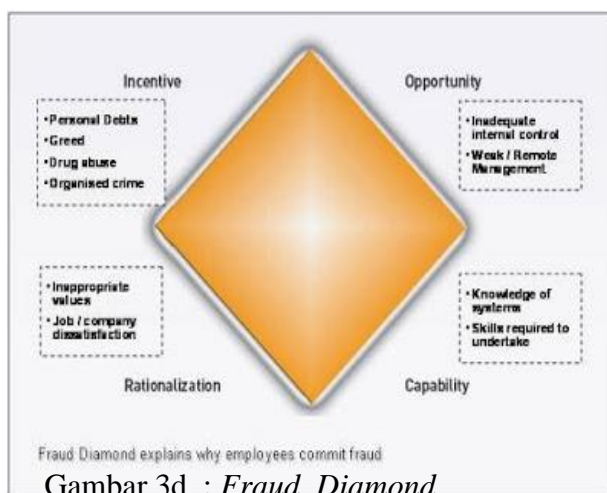
terdapat empat faktor yang mendorong terjadinya fraud, yaitu :

1. *Greed* (ketamakan/keserakahan) adalah keinginan untuk selalu memperoleh sebanyak-banyaknya (KBBI Daring, 2008). Ketamakan sangat berhubungan dengan moral seorang individu.
2. *Opportunity* (kesempatan/peluang) merupakan suatu keadaan yang bisa datang kapan saja. Selain itu, peluang sangat bergantung pada tingkat kedudukan jabatan seseorang. Semakin tinggi jabatan seseorang, semakin besar peluangnya melakukan kecurangan.
3. *Need* (kebutuhan) dapat menjadi faktor penyebab tindak kecurangan saat kebutuhan seseorang (dapat dikatakan) sangat mendesak. Tuntutan akan pemenuhan kebutuhan inilah yang kemudian menjadikan seseorang untuk mengambil jalan pintas dengan bertindak curang.



4. *Exposure* (pengungkapan) berkaitan dengan hukuman pelaku fraud. Dengan terungkapnya suatu kecurangan dalam perusahaan tidak menutup kemungkinan terulangnya hal yang sama apabila hukuman atau saksi yang diberikan lemah dan tidak menimbulkan sifat jera.

#### 4. Teori *Fraud Diamond*



Gambar 3d : *Fraud Diamond*

Teori diamond ini merupakan pengembangan dari *fraud triangle*. Teori *Fraud Diamond* yang diperkenalkan oleh Wolfe & Hermanson (2004) adalah teori yang menunjukkan hubungan antara empat elemen yaitu *incentive* (dorongan), *oppurtunity* (kesempatan), *rasionalization* (pembenaran), dan *capability* (kapabilitas).

Kecurangan atau *fraud* terjadi karena 4 elemen yaitu:

##### 1. *Incentive*

*Incentive* merupakan suatu dorongan yang timbul karena adanya tuntutan atau tekanan yang dihadapi oleh seseorang. *Incentive* dapat memicu terjadinya kecurangan seperti keserakahan yang mengakibatkan tekanan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

##### 2. *Opportunity*

*Opportunity* adalah suatu kesempatan yang timbul karena terdapat kelemahan pengendalian internal organisasi atau perusahaan dalam pencegahan dan pendeteksian kecurangan. *Oppurtunity* dapat terjadi karena adanya kekuasaan terhadap organisasi dan juga karena seorang *fraudster* atau orang-orang yang melakukan kecurangan mengetahui kelemahan dari sistem-sistem yang ada.

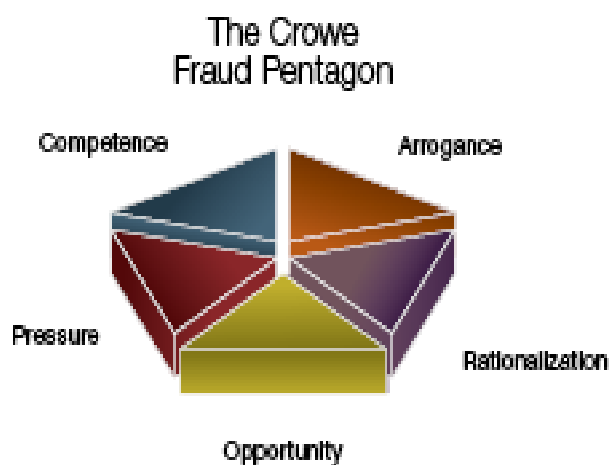
### 3. *Rationalization*

*Rationalization* adalah kondisi dimana fraudster atau pelaku kecurangan mencari suatu pembenaran terhadap tindakan yang dilakukannya untuk memperoleh kekayaan dengan cara yang cepat.

### 4. *Capability*

Merupakan sifat dan kemampuan pribadi seseorang yang mempunyai peranan besar yang memungkinkan melakukan suatu tindak kecurangan.

### 5. Teori *The Crowe Fraud Pentagon*



Gambar 3e . *Fraud Pentagon*

Teori terbaru yang mengupas lebih mendalam mengenai faktor-faktor pemicu *fraud* adalah teori *fraud pentagon* (*Crowe's fraud pentagon theory*). Teori ini

dikemukakan oleh Crowe Howarth pada tahun 2011. Teori *fraud pentagon* merupakan perluasan dari teori *fraud triangle* yang sebelumnya dikemukakan oleh Cressey. Dalam teori ini Howarth menambahkan dua elemen *fraud* lainnya yaitu kompetensi dan arogansi (*competence and arrogance*). Kompetensi (*competence*) yang dipaparkan dalam *fraud* memiliki makna yang serupa dengan kapabilitas atau kemampuan (*capability*) yang sebelumnya dijelaskan dalam teori *fraud diamond*. Kompetensi atau kapabilitas merupakan kemampuan karyawan untuk mengabaikan kontrol internal, mengembangkan strategi penyembunyian, dan mengontrol situasi sosial untuk keuntungan pribadinya. Menurut Crowe, arogansi adalah sikap superioritas atas hak yang dimiliki dan merasa bahwa internal kontrol atau kebijakan perusahaan tidak berlaku untuk dirinya.

## 6. Teori *The Fraud Hexagon*



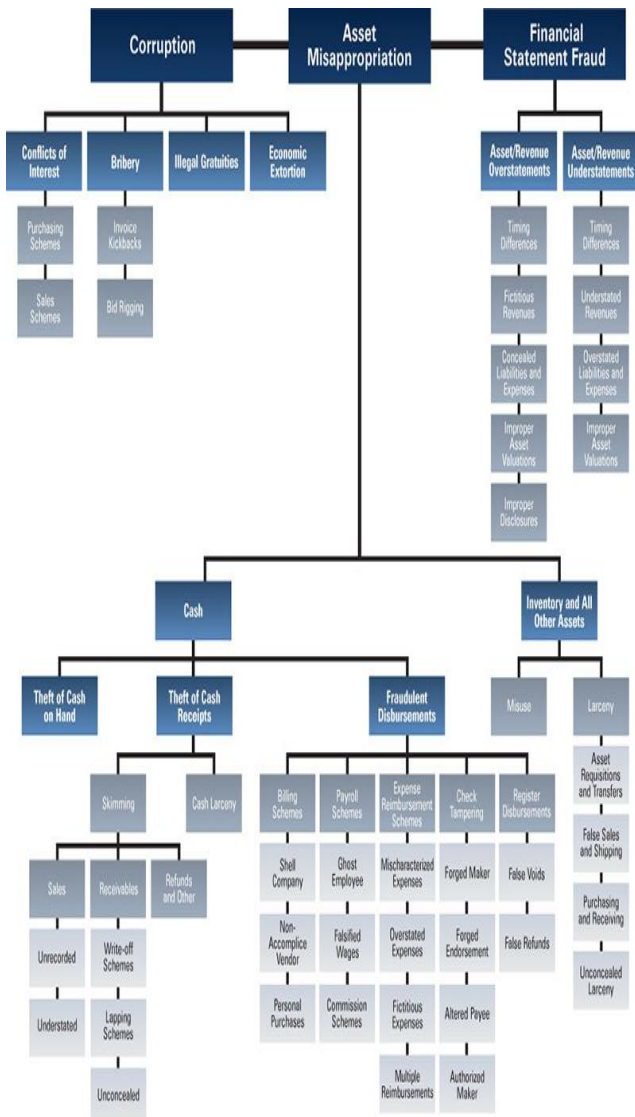
Gambar 3f : *The Fraud Hexagon*

Menurut Vausinas (2019) penemu Model *Fraud Hexagon* menyebutkan bahwa tingginya tingkat *fraud* dalam beberapa dekade terakhir, termasuk Enron, WorldCom dan Parmalat, semuanya membenarkan bahwa *collusion* adalah elemen sentral dalam banyak penipuan yang kompleks dan mahal serta kejahatan finansial (kerah putih). Memang, sulit untuk mengidentifikasi kecurangan organisasi besar baru-baru ini yang tidak melibatkan banyak anggota organisasi. Istilah *collusion* mengacu pada perjanjian yang menipu atau kompak antara dua orang atau lebih, bagi satu pihak untuk melakukan tindakan terhadap pihak lain untuk beberapa tujuan jahat, seperti menipu pihak ketiga dari hak-haknya. Pihak-pihak yang terlibat dalam

*collusion* dapat berupa karyawan dalam suatu organisasi, sekelompok individu yang mencakup beberapa organisasi dan yurisdiksi atau anggota organisasi kriminal atau kolektif yang berdedikasi. Begitu ada *collusion* antara karyawan, atau antara karyawan dan pihak eksternal, penipuan jauh lebih sulit untuk dihentikan dan ini, terutama saat ini merupakan masalah yang terus berkembang (Vausinas, 2019).

### ***FRAUD TREE***

*Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) menggambarkan *occupational fraud* dalam bentuk *fraud tree*. *Fraud tree* merupakan gambaran sistematis yang menunjukkan bagian-bagian dari *fraud*. Berdasarkan *fraud tree* di atas, *fraud* terdiri dari tiga cabang pokok yaitu *Corruption* (Korupsi), *Asset Misappropriation* (Penyimpangan atas aset), dan *Fraudulent Statements* (manipulasi laporan).



Gambar 3g : Fraud Tree

**METODE PENELITIAN**

*Jenis dan Sumber Data*

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data data sekunder. Data sekunder diperoleh dari melakukan studi literatur dari berbagai penelitian tentang kecurangan yang dilakukan selama tahun 2010 sampai dari 2020 dari seluruh jurnal baik itu jurnal nasional ataupun

internasional. Pengambilan data paper dengan menggunakan *keywords* deteksi kecurangan, pendeteksi kecurangan dan kecurangan pelaporan keuangan.

*Teknik Pengumpulan Data*

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data adalah sebagai berikut:

1) Dokumentasi

Menurut Sugiyono (Sugiyono, 2007) dokumen yaitu catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi dalam penelitian ini akan berupa catatan atas pelaporan keuangan pemerintah pusat.

2) Studi Pustaka

Menurut Indriantoro dan Supomo (2002) studi pustaka yaitu bahan utama dalam penelitian data sekunder. Peneliti memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti melalui buku, jurnal/literatur, internet dan perangkat lain yang berkaitan dengan

analisa laporan keuangan pemerintah pusat.

## MODEL PENELITIAN

Model penelitian ini adalah dengan menggunakan model penelitian review literatur dengan menggunakan metode *Systematic mapping study*. *Systematic mapping study* adalah metode literature review yang sistematis dengan menggunakan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pemilihan paper juga tidak dilakukan secara subyektif oleh peneliti, akan tetapi menggunakan protokol dan filter yang telah ditetapkan di depan. *Systematic mapping study* biasanya dilakukan untuk topik penelitian yang lebih luas daripada *traditional review*.

## HASIL PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab beberapa pertanyaan penelitian yang diantaranya adalah metode deteksi kecurangan yang dilakukan untuk mendeteksi kecurangan apakah yang paling sering digunakan. Penelitian ini dilakukan

dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laman Google Cendikia dan peneliti melakukan *browsing* untuk semua penelitian di Indonesia. Peneliti melakukan pencarian data dengan menggunakan kata kunci deteksi kecurangan, deteksi *fraud* dan pendeteksian kecurangan. Penelitian dilakukan untuk semua tahun mulai dari tahun 2010 hingga penelitian tahun 2020.

Kecurangan akuntansi ini dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu kecurangan laporan dan kecurangan transaksi. Kecurangan laporan mencakup kesalahan pelaporan yang disengaja sehingga terlihat kondisi keuangan perusahaan lebih baik dari pada kenyataannya dan akhirnya menipu para pemegang saham investor dan kreditur. Kecurangan laporan yang paling banyak terjadi adalah pendapatan dan persediaan yang ditinggikan atau biasa disebut pola *Income Maximization*, perataan laba (*Income Smoothing*), serta pengaturan laba (*Earnings Management*). Adapun Kecurangan transaksi biasanya dilakukan untuk mempermudah pencurian atau

konversi aset entitas atau perusahaan menjadi aset pribadi. Kecurangan transaksi contohnya adalah pengalihan aset perusahaan menjadi aset milik pribadi dan hutang fiktif. Alberecht et al., (2011) dalam Annisya (2016) menyatakan bahwa “fraud is a generic term, and embraces all the multifarious means which human ingenuity can devise, which are resorted to by one individual, to get an advantage over another by false representations”. Berdasarkan pendapat Alberecht et al (2011) dapat dikatakan bahwa fraud adalah tindakan bersifat umum dan mencakup beragam makna berupa cara cerdik seseorang yang dirancang untuk mendapatkan keuntungan dengan penyajian yang salah (Annisya, 2016). Selain itu menurut Alberecht et.al (2011) dalam Sihombing (2014) fraud diklasifikasikan menjadi lima jenis yaitu:

1. Employee embezzlement atau occupational fraud, yaitu pencurian yang dilakukan dalam perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dilakukan karyawan perusahaan.
2. Management fraud, management fraud seringkali dikaitkan dengan financial statement fraud. Fraud ini dibedakan dengan jenis fraud lainnya karena sifat dari pelaku dan metode operasinya. Metode yang sering dilakukan adalah management fraud dilakukan dengan melibatkan top management dalam melakukan manipulasi laporan keuangan.
3. Investment Scams, fraud ini erat kaitannya dengan management fraud. pada kasus ini, penipuan dilakukan agar investor tertarik terhadap peluang investasi yang seolah-olah bernilai tinggi padahal yang terjadi malah sebaliknya. Investor yang lalai akan sangat dirugikan oleh fraud ini.
4. Vendor Fraud yaitu kecurangan yang biasanya melibatkan karyawan yang terlibat secara langsung dalam proses pembelian bahan baku (perusahaan manufaktur) dan transaksi lainnya yang berhubungan dengan pemasok (vendor).

5. Customer Fraud yaitu jenis fraud dimana pelanggan melakukan penipuan dengan tidak membayar barang yang telah dibeli maupun menipu perusahaan dengan mengatakan bahwa perusahaan memberikan barang yang tidak sesuai dengan pesannya.
6. Other (Miscellaneous) Types of fraud, other types of fraud mencakup bentuk fraud lainya yang berpotensi menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) menggambarkan fraud atau kecurangan dalam bentuk fraud tree atau pohon fraud. Skema ini menggambarkan cabang-cabang fraud dalam hubungan kerja beserta ranting dan anak rantingnya masing-masing.

Beberapa alasan masih sedikitnya penelitian tentang kecurangan di sektor publik diantaranya adalah kesulitan data kecurangan di sektor publik, selain itu adanya asumsi bahwa sektor privat lebih banyak kemungkinan melakukan kecurangan dibandingkan dengan sektor

publik. Di sektor privat telah tersedia data laporan keuangan dari perusahaan yang *go publik* untuk diteliti, sedangkan untuk sektor publik, laporan keuangan harus mengajukan permintaan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

## KESIMPULAN

Penelitian ini meneliti tentang pendeteksian kecurangan pada sektor swasta yaitu kecurangan dalam laporan keuangan dan pemerintahan dalam hal ini adalah BPK (Badan Pengawas Keuangan) yang dikaitkan dengan teori kecurangan (Fraud Detection). Rata – rata penelitian tentang kecurangan baik sector swasta maupun sector pemerintahan masih menggunakan Teori Fraud Triangle. Padahal sejauh ini perkembangan teori mengenai fraud sudah sampai kepada teori fraud pentagon. Adapun saran untuk penelitian ini adalah adanya pengembangan dalam penelitian seperti sejauh mana efektifitas dari masing-masing metode pendeteksian. Untuk peneliti selanjutnya disarankan memakai teori Fraud Pentagon untuk dapat menganalisa dan

mendeteksi kecurangan yang terjadi pada sektor swasta dan sektor pemerintahan sehingga dapat menambah wawasan bagi penulis dan pembaca mengenai pendeteksian kecurangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Albeksh, Hasen Mohamed. A. 2016. *Factors Affecting the Independence of the External Auditor within the Auditing Profession*. International Journal of Management and Commerce Innovations. Vol. 4, Issue 2, pp 680-689.
- Arens, Alvin A., Randal J. Elder, dan Mark S. Beasley. 2016. *Auditing and Assurance Service: An Integrated Approach*. Fifteenth Edition. Singapore: Pearson Education.
- Amarin, Hani. (2016). *Pengaruh Independensi, Kecerdasan Emosional dan Kecerdasan Spiritual Terhadap Kinerja Auditor*. Accounting Analysis Journal, 5(2), 131-138.
- Albrecht, C., Holland, D., Malagueno, R., Dolan, S. and Tzafrir, S. (2015), "The role of power in financial statement fraud schemes", Journal of Business Ethics, Vol. 131 No. 4, pp. 803-813.
- Amarin, Hani. (2016). *Pengaruh Independensi, Kecerdasan Emosional dan Kecerdasan Spiritual Terhadap Kinerja Auditor*. Accounting Analysis Journal, 5(2), 131-138.
- Aisyah, E. A., & Sukirman. 2015. *Hubungan Pengalaman, Time Budget Pressure, Kompensasi terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Semarang*. Accounting Analysis Journal, 4(1), 1-11.
- Alamsyah, A., & Rahardjo, B. (2013). *Financial Fraud Detection using Social Network Analysis*. In E-Indonesia Initiatives (EII Forum). Institut Teknologi Bandung.
- Cressey, D. R. (1953). *Other people's money: A study in the social psychology of embezzlement*. Glencoe, Ill: Free Press.
- Fransisco et al. (2019) *'Pengaruh Kompetensi, Independensi dan Tekanan Waktu Terhadap Kemampuan Auditor Mendeteksi Kecurangan dengan*



- Skeptisisme Profesional Sebagai Variabel Intervening*, Prosiding Seminar Nasional Pakar ke 2 Tahun 2019, (2), pp. 1–10. doi: 2615 - 2584.
- Fuad, K. *Pengaruh Independensi, Kompetensi, dan Prosedur Audit terhadap Tanggung jawab dalam Pendeteksian Fraud*. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 7(1), 10-17.
- Furiady, O., & Kurnia, R. (2015). *The Effect of Work Experiences, Competency, Motivation, Accountability and Objectivity towards Audit Quality*. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 211, 328–335. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.042>.
- Kusuma Satria Panji & Sukirman 2017. *The Effect of Emotional Intelligence and Auditor's Experience on Audit Quality with Independence as A Moderating Variable*. *Accounting Analysis Journal AAJ* 6 (3) 2017. 370-379.
- Librayanti, F. (2018, December 20). *The Governor of North Sumatra Receives LHP from North Sumatra BPK, There is a Loss of Rp1 Trillion*. Accessed from <http://www.gatra.com/rubrik/nasional/>.
- Mintz, S. (2015). *Whistleblowing considerations for external auditors under Dodd-Frank: A blueprint for future research*. In C. Jeffrey (Ed.), *Research on professional responsibility and ethics in accounting* (Vol. 19, pp. 99–128). Emerald Group Publishing Limited.
- Molina and Wulandari, Safitri. (2018). *Effect of Experience, Workload and Time Pressure on the Auditor's Ability to Detect Fraud*. *Journal of Accounting Science*. Vol. 16. No. 2
- Muna, B. N., & Harris, L. (2018). *PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL DAN ASIMETRI AKUNTANSI ( Penelitian Persepsi Pengelola Keuangan pada Perguruan Tinggi Negeri BLU)*. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 6(1), 35–44.
- Purnamasari, P., & Amaliah, I. (2015). *Fraud prevention: relevance to religiosity and spirituality in the workplace,*

- 211(September), 827–835. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.109>.
- Puspitaningrum, W. P. (2014). Pendeteksian Kecurangan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Surakarta). *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 14(1).
- Sutrisno T., Nurkholis Nurkholis and Wuryan Andayani, 2019. *Why people commit public procurement fraud? The fraud diamond view*. *Journal of Public Procurement* Vol. 19 No. 4, 2019 pp. 345-362. Emerald Publishing Limited 1535-0118. DOI [10.1108/JOPP-02-2019-0012](https://doi.org/10.1108/JOPP-02-2019-0012).
- Suryani, E., & Helvinda, V. A. (2015). PENGARUH PENGALAMAN, RISIKO AUDIT, DAN KEAHLIAN AUDIT TERHADAP PENDETEKSIAN KECURANGAN (FRAUD) OLEH AUDITOR (SURVEY PADA KAP DI BANDUNG).
- Tumanggor, Fajar A. (2017, November 29). *Responding to the Medan City Corruption Perception Index*. Accessed from <http://indonesiana.tempo.co/read/19990402/>
- Vousinas Georgios L, 2019. *Advancing theory of fraud: The S.C.O.R.E. Model*. *Journal of Financial Crime*. <https://doi.org/10.1108/JFC-12-2017-0128>.
- Walter Cameron Malau, Paschal Ohalehi, Eldin Soha Badr, Kemi Yekini, 2018. *Fraud interpretation and disclaimer audit opinion Evidence from the Solomon Islands public sector (SIPS)*. *Managerial Auditing Journal*, 11 November 2018
- Wolfe, David T., and Dana R. Hermanson. "The Fraud Diamond: Considering the Four Elements of Fraud." *CPA Journal* 74.12 (2004): 38-42.